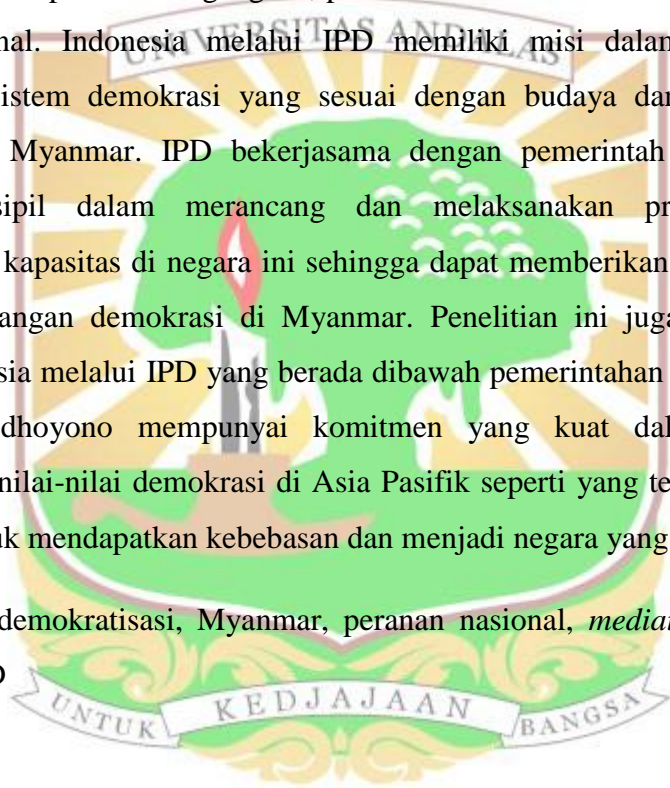


ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peranan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam membantu demokratisasi di Myanmar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Peranan Nasional serta *Strategic Program Directions* oleh *Institute for Peace and Democracy* (IPD) untuk menganalisa peranan serta menjelaskan segala upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Dengan menggunakan konsep peranan nasional, dapat dilihat bahwa Indonesia berperan sebagai *mediator - integrator* dengan mempertimbangkan sumber-sumber seperti lokasi geografi, peranan tradisional serta komposisi etnis - budaya nasional. Indonesia melalui IPD memiliki misi dalam mencari dan menemukan sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan norma-norma kehidupan di Myanmar. IPD bekerjasama dengan pemerintah Myanmar dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan kapasitas di negara ini sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan demokrasi di Myanmar. Penelitian ini juga membuktikan bahwa Indonesia melalui IPD yang berada dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai komitmen yang kuat dalam membantu menyebarkan nilai-nilai demokrasi di Asia Pasifik seperti yang tengah terjadi di Myanmar untuk mendapatkan kebebasan dan menjadi negara yang demokratis.

Kata kunci : demokratisasi, Myanmar, peranan nasional, *mediator - integrator* Indonesia, IPD



ABSTRACT

This study analyzes the role and the steps taken by the Government of Indonesia to help democratization in Myanmar. In this study the authors use the National Role Concept and Strategic Directions Program by the Institute for Peace and Democracy (IPD) to analyze the role and explain all the efforts made by Indonesia. By using the concept of national role, it can be seen Indonesia as mediator - integrator has resources such as geographic location, and the ethnic composition of the traditional role - a national culture. Indonesia through the IPD has a mission to seek and find a democratic system that suits the culture and norms of life in Myanmar. IPD in cooperation with the Myanmar government and civil society in designing and implementing capacity building programs in the country so as to provide a positive impact for the development of democracy in Myanmar. This study also proves that Indonesia through IPD under the government of President Susilo Bambang Yudhoyono has a strong commitment to help spread democratic values in Asia Pacific as it is happening in Myanmar for more freedom and a democratic state.

Keywords: democratization, Myanmar, national role, mediator-integrator, Indonesia, IPD

